

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki struktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban mutlak dalam mengumpulkan sumber-sumber dana (penerimaan) untuk membiayai seluruh pengeluaran yaitu pengeluaran tidak langsung yang meliputi belanja operasi dan pengeluaran langsung yang meliputi belanja modal. Agar terwujud sasaran yang tepat dalam pengumpulan dana dan pembiayaan maka pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD terdiri dari penerimaan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pendapatn asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang penggunaannya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Belanja langsung merupakan belanja modal atau investasi berupa pengadaan sarana yang bersifat peningkatan produksi, belanja tidak langsung ini dibagi menurut bidang – bidang membentuk sub – sub sektor akan membuat program – program yang akan dilaksanakan berupa proyek – proyek pembangunan.

Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya untuk mensejahterkan masyarakat didaerahnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun.

Menurut keynes pemerintah perlu berperan dalam perekonomian. Dari berbagai kebijakan yang dapat diambil keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah ini dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran. Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rostow dalam jingnan, yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relative besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah harus tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Sedangkan Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wagner menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat.

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten Tanah Datar sebesar 4.844,42, pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5.423,08, tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 6.084,97. Belanja pemerintah daerah tahun 2009 untuk belanja tidak langsung sebesar 517.194.347.262, untuk belanja langsung sebesar 86.597.958.759, tahun 2010 belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar 585.938.599.967, untuk belanja langsung mengalami penurunan sebesar 40.916.943.448. Pada tahun 2011 belanja tidak langsung

mengalami penurunan sebesar 501.796.326.721, untuk belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 115.834.646.748.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dari penulis lebih lanjut ingin membahas sebuah laporan akhir yang berjudul **“Studi Tentang Pengeluaran Pemerintah (Belanja) dan Perekonomian di Kabupaten Tanah Datar”**

1.2 Rumusan Masalah

Maka masalah yang ingin diungkapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan belanja tidak langsung terhadap PDRB di kabupaten tanah datar?
2. Bagaimana hubungan belanja langsung terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Datar ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah :

1. Dapat mengetahui hubungan belanja tidak langsung terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui hubungan belanja langsung terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Agar penulisan ini dapat terarah dan bahasanya lebih terperinci, maka penulis memberikan batasan pembahasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas tentang hubungan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian di Kabupaten Tanah Datar.
2. Data yang digunakan adalah data pengeluaran pemerintah dan PDRB dari tahun 2003 – 2012.

1.5 Sistematika penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah , tujuan dan ruang lingkup kajian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, pengertian PDRB, klasifikasi PDRB, pengertian pengeluaran pemerintah dan teori pengeluaran pemerintah.

BAB III : GAMBARAN UMUM SERTA KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN TANAH DATAR

Gambaran umum berisi tentang letak dan kondisi wilayah, iklim, penduduk, serta sarana dan prasarana. Sedangkan kondisi perekonomian menggambarkan tentang struktur ekonomi, perkembangan ekonomi, PDRB perkapita.

BAB IV : PEMBAHASAN

Memuat tentang hubungan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini penulis mencoba mengambil pokok – pokok pilihan dari penulisan ini yang dituangkan dalam bentuk kumpulan dan penulis juga melakukan beberapa saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor – faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor – faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal.

Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh karena itu untuk memberikan suatu gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam periode tertentu adalah data produk domestik regional bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada periode tertentu.

2.2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan.

2.2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Perhitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku tapi penilaiannya dilakukan dengan harga satu tahun dasar tertentu. NTB atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu dasar tertentu.

Perehitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, juga melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

2.3 Konsep Dasar Pengeluaran Pemerintah

2.3.1 Pengeluaran Pemerintah

Menurut Kurnarjo mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Dikatakan pula bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja langsung bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam preoyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendekatan pada upaya peningkatan pertumbuhan tidak semata – mata menentukan pertumbuhan sebagai satu satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses pembangunan. Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian, salah satunya adalah pemebelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama pembelian faktor – faktor produksi (input) dan pembelian produk (output). Kedua untuk pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja tidak langsung) serta untuk investasi pemerintah (belanja langsung). Pengeluaran pemerintah yang diukur dari pengeluaran tidak langsung dan langsung mempunyai peran dana dan fungsi yang cukup besar untuk mendukung sasaran pembangunan dalam menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan misi pelayanan secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk peningkatan produksi. Layaknya pengeluaran masyarakat, maka pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui *multiplier effect* dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat, sehingga PDRB meningkat.

Meningkatnya PDRB merupakan indikasi timbulnya suatu perekonomian yang akan menambah penerimaan. Pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara. Walaupun demikian peningkatan pengeluaran pemerintah belum tentu berakibat baik terhadap aktifitas perekonomian. Oleh karena itu perlu juga dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut.

Suparmoko menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi :

- a. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang
- b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat
- c. Pengeluaran menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran yang lebih luas.

2.3.2 Jenis-jenis Pengeluaran Pemerintah

- a. Pengeluaran tidak langsung

Pengeluaran tidak langsung yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari meliputi, belanja pegawai, belanja barang berbagai macam subsidi, angsuran dan bunga hutang pemerintah serta jumlah pengeluaran lain.

Anggaran belanja tidak langsung memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

- b. Pengeluaran langsung

Pengeluaran langsung yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prsarana fisik dan non fisik.

Pengeluaran langsung merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya

selalu dapat disesuaikan dengan dana yang telah ditetapkan. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan.

2.3.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah $Y = C + I + G$. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah Pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian.

Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (*multiplier effect*) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (*over-heating*). Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (*injection*) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

2.4 Metodologi Penelitian

a. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari tahun 2003 sampai tahun 2012. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan model kuadrat terkecil (Ordinary Least Square).

Adapun model persamaanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

Kemudian model persamaaan diatas dapat diubah menjadi regersi linier berganda dalam bentuk logaritma natural sebagai berikut :

$$LY = \alpha + \beta_1 LX_1 + \beta_2 LX_2 + \mu$$

Dimana :

Y = PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) harga berlaku
Kabupaten Tanah datar (Jutaan Rupiah)

X_1 = Belanja Tidak Langsung (Jutaan Rupiah)

X_2 = Belanja Langsung (Jutaan Rupiah)

L = Logaritma

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

μ = Term of Error

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

3.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di propinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai Luhak Nan Tuo terletak pada 00 derajat 17” samapi dengan 00 derajat 39” lintang selatan dan 100” 19” sampai dengan 100 derajat 51 bujur timur mempunyai luas 1336,00 km². Wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan dan pada 75 Nagari.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada disekitar kaki gunung merapi, Gunung Singggalang, dan Gunung Sago, serta diperkaya pula dengan 25 sungai. Danau singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak dikecamatan Batipuah Selatan dan Rambatan.

Diantara seluruh kecamatan yang ada, tiga kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu kecamatan x koto, Salimpaung dan Tanjung Baru. Semenatara itu empat kecamatan lainnya, yaitu kecamatan Limau Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 sampai dengan 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan tujuh kecamatan lagi terletak pada ketinggian antara 200 sampai dengan 750 meter dari permukaan laut.

Bila dilihat dari luas wilayah kecamatan, maka kecamatan yang paling kecil luasnya adalah kecamatan Tanjung Baru dengan luas 43,14 km², sedangkan kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 km², kemudian diikuti kecamatan x koto yang luasnya 152,02km².

3.1.2 Penduduk

Berdasarkan hasil survei penduduk tahun 2010 yang dilakukan pada tanggal 1-31 Mei 2010 memberikan informasi bahwa pada jumlah penduduk kabupaten Tanah Datar mencapai 338.494 jiwa yang tersebar diseluruh nagari atau seluruh jorong, sedangkan jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2011 sebanyak 340,073 dan tahun 2009 sebanyak 340,733

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2009	2010	2011
1	X Koto	39.313	42.133	42.329
2	Batipuah	31.350	29.896	30.035
3	Batipuh Selatan	10.926	10.430	10.479
4	Pariangan	21.330	19.519	19.610
5	Rambatan	33.117	33.287	33.442
6	Limau kaum	34.814	35.784	35.951
7	Tanjung Emas	21.295	21.689	21.790
8	Padang Ganting	13.862	13.641	13.705
9	Lintau Buo	15.664	17.565	17.646
10	Lintau Buo Utara	34.788	34.810	34.973
11	Sungayang	16.948	16.903	16.982
12	Sungai Tarab	32.979	29.282	29.418
13	Salimpaung	21.033	20.768	20.865
14	Tanjung Baru	13.319	12.788	12.847
Jumlah Total		340.733	338.494	340.073

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel diatas dapat diinformasikan tentang penyebaran penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Jumlah penduduk terbanyak setiap tahunnya adalah kecamatan X koto, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kecamatan Batipuh Selatan.

3.1.3 Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil survey Angkatan kerja nasional 2011 diperoleh informasi bahwa dari 238.571 orang berusia 15 tahun yang ada di Kabupaten Tanah Datar terdapat sebanyak 155.550 orang diantaranya merupakan penduduk kelompok angkatan kerja. Dari jumlah tersebut ada sejumlah 149.038 yang sudah memperoleh pekerjaan, sedangkan 6.512 orang lainnya masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Sebanyak 83.021 orang berusia diatas 15 tahun lainnya termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja yang terbagi kedalam tiga kelompok kegiatan yaitu 44.409 orang mempunyai kegiatan mengurus rumah tangga, 19.257 orang mempunyai kegiatan utama bersekolah dan 19.335 orang lainnya mempunyai kegiatan yang bervariasi(sakit, menganggur, penduduk usia tua, dan lain – lain).

Tabel 3.2
Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2011 (jiwa)

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki – laki	Perempuan	
1. Angkatan Kerja	94.354	61.196	155.550
a. Bekerja	90.310	58.728	149.038
b. Mencari pekerjaan	4.044	2.468	6.512
2. Bukan Angkatan Kerja	19.120	63.901	83.021
a. Sekolah	7.330	11.927	19.257
b. Mengurus Rumah Tangga	1.812	42.597	44.409
c. Lainnya	9.978	9.337	19.355

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

Komposisi angkatan kerja menurut jenis kelamin, tampak bahwa penduduk yang bekerja ataupun pencari kerja didominasi oleh laki – laki, sedangkan untuk para perempuan lebih terfokus pada kategori bukan angkatan kerja melainkan pada kegiatan mengurus rumah tangga

Tabel 3.3
Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011 (jiwa)

No	Lapangan Usaha	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	38.371	23.271	61.642
2	Pertambangan dan Penggalian	290	0	290
3	Industri Pengolahan	7.958	8.191	16.149
4	Listrik dan Air	253	0	253
5	Bangunan/ kontruksi	5.284	344	5.628
6	Perdagangan Hotel dan Restoran	16.172	16.471	32.643
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10.098	463	10.561
8	Lembaga, keuangan, jasa persewaan	804	193	997
9	Jasa – jasa	11.080	9.795	20.875

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

Sejalan dengan potensi perekonomian Tanah Datar yang didominasi oleh sektor pertanian, penduduk yang bekerja banyak terserap pada sektor pertanian. Dari seluruh penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan sedang bekerja sebanyak 61.642 orang bekerja di sektor pertanian dengan komposisi 38.371 orang lak - laki dan 23.271 perempuan. Selanjutnya aktivitas ekonomi kedua terbesar yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Tanah Datar adalah sektor Perdagangan Hotel dan Restoran yang dapat memperkejakan sebanyak 32.634 orang penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

3.2 Keadaan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar

Dari pengolahan PDRB diperoleh laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,88 persen selama tahun 2009. Bila dibandingkan tahun 2008 (5,91 persen) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun (5,79 persen), akselerasi kinerja perekonomian Tanah Datar sedikit melambat. Tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai Propinsi Sumatera Barat yang hanya mampu tumbuh sebesar 4,16 persen.

Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2009 diakibatkan ada beberapa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang rendah dan relatif melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri dan sektor Jasa-jasa. Namun, bila menelaah lebih lanjut sampai subsektor terlihat perkembangan laju pertumbuhan masing-masing subsektor ekonomi relatif cukup bervariasi.

Meskipun sektor Pertanian selama tahun 2009 menghasilkan nilai tambah terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Tanah Datar namun demikian jika dilihat dari perannya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, sektor Pertanian selama tahun 2009 hanya mampu tumbuh sebesar 5,36 persen. Pertumbuhan yang dicapai oleh sektor Pertanian tersebut sedikit lamban dibandingkan dengan pertumbuhan yang dialami pada tahun 2008 dimana pada tahun 2008 sektor Pertanian mampu tumbuh sebesar 5,58

persen. Bahkan bila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun ke belakang pertumbuhan sektor Pertanian di tahun 2009 masih cenderung lamban. Hal tersebut dipicu dengan melambatnya akselerasi laju pertumbuhan di hampir seluruh subsektor Pertanian, diantaranya subsektor Tanaman Bahan Makanan (5,37 persen), Perkebunan (5,87 persen), Peternakan (4,85 persen), Kehutanan (2,06 persen), dan Perikanan (6,98 persen).

Sama halnya dengan sektor Pertanian, sektor lain yang mengalami perlambatan diantaranya sektor Pertambangan dan Penggalian (5,91 persen), Industri Pengolahan 5,99 persen, serta sektor Jasa-jasa dengan pertumbuhan sebesar 5,97 persen.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2007 – 2009

No	Lapangan Usaha Utama	Tahun		
		2007	2008	2009
1	Pertanian	6,17	5,44	5,36
2	Pertambangan dan Penggalian	3,15	5,97	5,91
3	Industri Pengolahan	5,80	6,03	5,99
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	9,05	6,14	6,36
5	Bangunan	3,94	6,31	6,41
6	Perdagangan, Hotel Dan Resto	5,58	5,89	5,96
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,33	6,29	7,07
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,93	6,91	7,07
9	Jasa-Jasa	7,36	6,31	5,97
Jumlah		6,05	5,91	5,88

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

Selama tahun 2009 sektor Pengangkutan dan Komunikasi merupakan sektor ekonomi yang akselerasinya paling cepat yakni mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pertumbuhan sebesar 6,29 persen. Dimana subsektor Angkutan jalan raya tumbuh sebesar 6,71 persen dan subsektor Jasa penunjang angkutan sebesar 5,62 persen, dan subsektor Pos dan Telekomunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 13,69 persen.

Kemudian sektor yang cukup tinggi pertumbuhannya diikuti oleh sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen. Pada sektor ini pertumbuhan yang lebih baik disumbangkan oleh subsektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank sebesar 8,47 persen, hal ini dimungkinkan dipicu dengan meningkatnya perkoperasian di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya adalah sektor Listrik, Gas, Air bersih (6,36 persen), Bangunan (6,41 persen), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (5,96 persen).

3.2.2 Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Datar

Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas sembilan sektor ekonomi. Sehingga struktur ekonomi sekaligus dapat menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB pada daerah tertentu. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing – masing sektor ekonominya.

Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi terdapat kecenderungan bahwa setiap tahun telah terjadi pergeseran antar sektor ekonomi dan pergeseran tersebut diakibatkan adanya perkembangan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing – masing sektor ekonomi.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kabupaten Tanah Datar sektor pertanian sebagai basis utama perekonomian Kabupaten Tanah Datar yang menyumbang kontribusi terbesar dengan rata – rata 37,84 persen selama lima tahun terakhir. Di tahun 2011 kontribusi sektor pertanian sebesar 37,49 persen.

Tabel 3.5
PDRB Kabupaten Tanah Datar
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2009-2011 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha Utama	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Pertanian	1.829,52	2.045,42	2.281,42
2	Pertambangan dan Pengggalian	88,96	99,03	110,73
3	Industri Pengolahan	569,08	637,66	712,85
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	48,25	51,88	56,69
5	Bangunan	382,48	432,48	492,13
6	Perdagangan, Hotel Dan Resto	608,93	677,80	754,68
7	Pengangkutan dan Komunikasi	320,49	367,72	412,24
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	166,99	187,50	212,01
9	Jasa-Jasa	829,72	928,59	1.052,22
Jumlah		4.844,42	5.423,08	6.084,97

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 PDRB yang diperoleh sebesar 6,084 milyar rupiah yang meningkat sebesar 0,89% dari tahun 2010. Nilai yang dicapai selama tahun 2011 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2010 sebesar 5,423 milyar rupiah.

Begitu juga apabila dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan terlihat pada tabel.

Tabel 3.6
PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009-2011 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan usaha	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Pertanian	923,83	972,12	1.025,12
2	Pertambangan dan Pengggalian	43,29	46,29	48,91
3	Industri Pengolahan	300,62	318,69	336,91
4	Listrik,Gas dan Air Bersih	22,43	23,86	25,22
5	Bangunan	178,35	189,82	202,20
6	Perdagangan,Hotel Dan Resto	326,12	345,65	365,73
7	Pengangkutan dan Komunikasi	135,56	145,36	155,23
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	86,76	92,95	99,73
9	Jasa-Jasa	451,38	479,45	507,76
Jumlah		2.468,74	2.614,19	2.766,81

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

Secara keseluruhan, nilai tambah seluruh sektor ekonomi selama tahun 2011 tercatat sebesar 2.766,81 milyar yang meningkat sebesar 0,94% dibandingkan nilai tambah pada tahun 2010 yang sebesar 2.614,19 milyar.

Secara keseluruhan kegiatan perekonomian di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 sektor pertanian masih menjadi sektor ekonomi andalan dengan nilai tambah yang paling besar yakni 2.281,42 milyar kemudian sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1.052,22 milyar dan 754,68 milyar.

3.3 Keadaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

3.3.1 Pendapatan Daerah

Perkembangan keuangan Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran 2011. Kondisi tersebut terlihat dari adanya peningkatan nilai dana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar selama tahun anggaran 2012 terealisasi sejumlah 760,00 milyar rupiah dari target yang ditetapkan yakni sebesar 759,86 milyar rupiah. Ini berarti realisasi anggaran Pendapatan Daerah tahun 2012 melampaui target yang ditetapkan (100,02 persen). Tahun anggaran 2010 terealisasi sejumlah 562,41 milyar rupiah dari target yang ditetapkan yakni sebesar 563,19 milyar rupiah. Tahun anggaran 2011 terealisasi sejumlah 670,66 milyar rupiah dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 677,49.

Tabel 3.7
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2012 (000)

No	Sumber penerimaan	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Pendapatan Asli Daerah	40.402.394	51.823.185	53.029.663
2	Pendapatan Transfer	519.253.952	620.144.225	706.764.633
3	Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	3.538.600	5.525.000	67.653
Jumlah Total		563.194.946	677.492.410	759.861.949

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

Seiring dengan meningkatnya jumlah penerimaan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2012 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan PAD yang diterima selama tahun anggaran 2011. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima selama tahun anggaran 2012 berjumlah 53,03 milyar rupiah, mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu sebesar 1,2 milyar rupiah dibandingkan dengan nilai PAD selama tahun anggaran 2011.

Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2012 (000)

No	Sumber penerimaan	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Pendapatan Asli Daerah	36.941.725	51.552.511	53.691.047
2	Pendapatan Transfer	522.015.372	619.060.072	706.009.115
3	Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	3.456.703	52.283	303.624
Jumlah Total		562.413.800	670.664.866	760.003.786

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

3.2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa tahun 2003 belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Hal ini disebabkan karena belanja langsung kabupaten tanah datar lebih diprioritaskan. Kemudian pada tahun 2004 sampai 2012 belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini disebabkan karena belanja tidak langsung lebih diprioritaskan. Besarnya alokasi untuk belanja tidak langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai khususnya pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini terlihat jelas pada pengalokasian belanja pegawai yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2012 dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan berdasarkan pasal 63 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai berdasarkan beban

kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Tabel 3.9
Perkembangan pengeluaran pemerintah
2003-2012

Tahun	Belanja		Total Belanja
	Tidak langsung	Langsung	
2003	252.818.556	289.657.390	542.475.946
2004	271.453.374	205.411.923	476.865.297
2005	290.577.391	289.657.390	580.234.781
2006	280.723.608	152.347.087	433.070.695
2007	364.532.013	141.039.162	505.571.175
2008	516.506.836	155.128.819	671.635.655
2009	517.194.374	106.622.253	623.816.627
2010	585.938.599	147.539.197	733.477.796
2011	501.796.326	115.834.646	617.630.972
2012	665.450.882	112.232.930	777.683.812

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kajian

Hasil perhitungan regresi sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil pengolahan data dengan metode OLS

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error	t-hitung	f-hitung
Constant	7,19021	6,05837	1,1868	49,03657
LX ₁	0,732676	0,165926	4,4157	
LX ₂	-0,344575	0,165737	-2,0790	
R ²	0,9333	DW = 1,4406		
Adjusted R square	0,9143			

Sumber : lampiran

Penemuan empiris juga dapat ditulis pada persamaan berikut :

$$\text{Log Y} = 7,19021 + 0,732676 \text{ Log X}_1 - 0,344575 \text{ Log X}_2$$

$$\text{t-hitung} = (1,1686) \quad (4,4157) \quad (-2,0790)$$

Secara statistik berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dilihat bahwa kedua variabel bebas yaitu belanja tidak langsung (X₁) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap PDRB (Y), sedangkan belanja langsung (X₂) tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan nilai PDRB Kabupaten tanah datar (Y). Hal ini dapat ditunjukkan dengan terdapatnya nilai negatif pada Belanja Langsung (variabel bebas).

4.2 Uji Statistik

4.2.1 Uji Kesesuaian

1. koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan mengenai variabel terikat. Dari hasil perhitungan data diatas diperoleh nilai koefisien determinasi R^2 0,9333. Hal ini menggambarkan bahwa variabel bebas (belanja tidak langsung dan belanja langsung) secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan terhadap variabel terikat (PDRB) selama kurun waktu 2003-2012 sebesar 93.33 persen sedangkan sisanya sebesar 6.67 persen dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini.

2. Uji f- statistik

Uji f-statistik ini berguna untuk pengujian signifikansi pengaruh variabel bebas secara bersama – sama terhadap variabel terikat. Uji ini dipakai untuk melihat pengaruh variabel belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama-sama terhadap variabel PDRB. Berikut hasil pengujiannya:

Kriteria pengambilan keputusan

H_0 diterima jika F statistik < f tabel

H_a diterima jika f statistik > f tabel

$$V_1 = k = 2$$

$$V_2 = n - k - 1 = 10 - 2 - 1 = 7$$

$$F \text{ statistik} = 49,03657$$

$$F \text{ tabel} = 4,74$$

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa f statistik > f tabel ($49,03657 > (4,74)$), maka H_0 ditolak H_a diterima yang berarti secara bersama – sama variabel bebas (belanja tidak langsung dan belanja langsung) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (PDRB).

3. Uji t-statistik

Uji t-statistik berguna untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

a. Variabel belanja tidak langsung (LX_1)

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika t statistik < t tabel

H_a diterima jika t statistik > t tabel

$$df = n-k-1 = 10-2-1 = 7$$

$$t \text{ statistik} = 4,4157$$

$$t \text{ tabel} = 2,365$$

kesimpulan :

berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa t statistik > t tabel ($4,4157 > 2,365$) maka H_0 ditolak H_a diterima yang berarti belanja tidak langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.

b. Variabel belanja langsung (LX_2)

Kriteria pengambilan keputusan

H_0 diterima jika t statistik $<$ t tabel

H_a diterima jika t statistik $>$ t tabel

$df = n - k - 1 = 10 - 2 - 1 = 7$

t statistik = -2,0790

t tabel = 2,365

kesimpulan :

berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa t statistik $<$ t tabel (-2,0790 $<$ 2,365) maka H_a ditolak H_0 diterima yang berarti belanja langsung tidak mempengaruhi variabel terikat (PDRB)

4.3 Implikasi

Sejak tahun 2003 sampai 2012 belanja langsung terus mengalami penurunan dibandingkan dengan belanja tidak langsung, seharusnya pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu meningkatkan belanja langsung guna untuk meningkatkan PDRB, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran pemerintah menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran yang lebih luas.

Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendekatan pada upaya peningkatan pertumbuhan tidak semata – mata mentukan pertumbuhan sebagai satu satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses pembangunan. Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian, salah satunya adalah pemebelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai hubungan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian kabupaten tanah datar diambil kesimpulan :

1. Dari hasil perhitungan data diatas diperoleh nilai koefisien determinasi R^2 0,9333. Hal ini menggambarkan bahwa variabel bebas (belanja tidak langsung dan belanja langsung) secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan terhadap variabel terikat (PDRB) selama kurun waktu 2003-2012 sebesar 93,33 persen sedangkan sisanya sebesar 6,67 persen dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini.
2. Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa f statistik $>$ f tabel ($49,0365 > 4,74$) , maka H_0 ditolak H_a diterima yang berarti secara bersama – sama variabel bebas (belanja tidak langsung dan belanja langsung) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (PDRB).
3. Berdasarkan uji t-statistik bahwa variabel belanja tidak langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB sedangkan variabel belanja langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB.

5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Tanah Datar, pemerintah perlu mengurangi atau mengalokasikan anggaran belanja tidak langsung secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah perlu meningkatkan belanja langsung untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Datar

DAFTAR PUSTAKA

- Elmi, Bachrul (2002) *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Jhingan (2007) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka (2012), *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar*.
- Monanda, Reza (2009) *Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi*. Skripsi. Medan : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Muhardi, Werner. *Regresi Linier Dengan Eviews*.
- N. Gujarati, Damodar (2007) *Dasar – Dasar Ekonometrika*, Jilid I. Jakarta : Erlangga.
- Riduwan (2009) *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung : Alfa Beta.
- Sukirno, Sadono (2004) *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Suparmoko. (2000) *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- .

TUGAS AKHIR
STUDI TENTANG PENGELUARAN PEMERINTAH (BELANJA) DAN
PEREKONOMIAN KABUPATEN TANAH DATAR

Bidang studi Keuangan Negara dan Daerah



Diajukan oleh :

Reza Nofriyanti

1000542103

PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2014